



Modul
Analisis Kebijakan Kesehatan (KAK 471)

Materi 14
Health Impact Assessment (HIA) dan Review

Disusun Oleh:
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.

Universitas
Esa Unggul

Universitas Esa Unggul

2020

MODUL

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan *Health Impact Assessment* dan review pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bab ini akan dibagi menjadi subbab yaitu:

1. *Health Impact Assessment*

2. Review

B. Uraian dan Contoh

1. *Health Impact Assessment*

1.1 Definisi dan Tujuan Penilaian *Health Impact Assessment (HIA)*

Penilaian pengaruh terhadap kesehatan atau yang sering disebut dengan *Health Impact Assessment (HIA)* adalah kombinasi prosedur, metode dan alat untuk menilai bagaimana potensi resiko, efek atau dampak dari sebuah kebijakan dan program terhadap Kesehatan masyarakat. *Health Impact Assessment (HIA)* juga sebagai alat untuk mengidentifikasi pengaruh secara langsung dan tidak langsung pada kesehatan. *Health Impact Assessment (HIA)* juga menjadi pendekatan terstruktur untuk membaca situasi dan menganalisis/mengevaluasi kerja sama, mekanisme konsultasi publik dan bukti yang tersedia untuk pembuatan keputusan. Analisis pengaruh terhadap kesehatan didefinisikan sebagai pendekatan, instrument, alat atau upaya sistematis untuk menilai pengaruh positif dan negatif terhadap suatu kebijakan yang bersifat langsung dan potensial terhadap Kesehatan masyarakat.

Health Impact Assessment (HIA) melakukan analisis sistematis pengaruh Kesehatan dari kebijakan berbagai sektor lain di luar kesehatan. Pemanfaatan *Health Impact Assessment (HIA)* memberikan dasar yang rasional untuk

mempertimbangkan dilema kebijakan dan mengantisipasi potensi efek, dampak atau pengaruh di masa depan dan tidak sekedar mencukupkan dengan pertimbangan ketercapaian tujuan atau target pendek saat ini. Selain itu, *Health Impact Assessment (HIA)* juga memberikan legitimasi terhadap asesmen atau penilaian cakupan yang lebih luas dari kebijakan publik di luar sektor kesehatan.

Health Impact Assessment (HIA) telah diaplikasikan di tingkat lokal, regional dan nasional untuk mengevaluasi efek positif dan negatif berbagai intervensi kebijakan sektor nonkesehatan terhadap kesehatan. Penilaian pengaruh terhadap kesehatan dengan *Health Impact Assessment (HIA)* dilakukan oleh kementerian kesehatan, pembuat kebijakan, akademisi dan para pakar kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan individu atau kelompok komunitas atau pihak-pihak lain dari berbagai area yang bertujuan mendorong isu kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan dalam agenda kebijakan non kesehatan. Artinya *Health Impact Assessment (HIA)* merupakan pendekatan multisektoral dan antar sektor, dengan melibatkan berbagai *stakeholders* untuk memprediksi dan menilai dampak kesehatan dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *Health Impact Assessment (HIA)* didasarkan pada pandangan yang luas mengenai kesehatan. *Health Impact Assessment (HIA)* melengkapi analisis dan penilaian dengan “pengakuan” bahwa determinan atau penentu kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebijakan publik, status sosial dan ekonomi penyediaan dan akses pelayanan publik.

Health Impact Assessment (HIA) akan menghasilkan satu perangkat rekomendasi praktis yang didasarkan pada bukti dan hal ini akan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan mengenai bagaimana cara terbaik pembuat kebijakan dapat mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat. *Health Impact Assessment (HIA)* juga dapat memaksimalkan pengaruh positif dan menurunkan pengaruh negative kebijakan dan menyelesaikan masalah ketimpangan kesehatan. Efek pada masyarakat dapat termasuk pengaruh pada status kesehatan, dampak kesehatan, atau perubahan pada risiko kesehatan yang dihasilkan oleh kebijakan, program, ataupun proyek. Berikut contoh *Health Impact Assessment (HIA)* pada sektor kesehatan.

1.2 Bentuk-bentuk *Health Impact Assessment* (HIA)

Health Impact Assessment (HIA) dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam penilaian dampak lainnya, seperti penilaian pengaruh terhadap lingkungan, penilaian lingkungan strategis, penilaian dampak sosial dan penilaian dampak secara terintegrasi.

a. Penilaian pengaruh terhadap lingkungan (Environmental Impact Assessment)

Penilaian pengaruh terhadap lingkungan adalah prosedur yang menjamin bahwa implikasi terhadap lingkungan dari suatu kebijakan telah dipertimbangkan sebelum keputusan kebijakan dibuat atau ditetapkan. Proses *Health Impact Assessment* (HIA) melibatkan analisis efek atau akibat yang dapat terjadi pada lingkungan. Berbagai data, bukti hasil studi atau laporan dari masyarakat tentang efek atau dampak dari sebuah kebijakan, program atau proyek tertentu pada lingkungan menjadi pertimbangan. Ketika membuat keputusan akhir, dan kemudian kembali diinformasikan kepada publik setelah keputusan dibuat. Penilaian pengaruh terhadap lingkungan lebih banyak digunakan pada proyek bersifat “teknis operasional” dan menyentuh langsung lingkungan dan masyarakat dibanding kebijakan-kebijakan strategis dengan cakupan lebih luas.

Manfaat atau “keuntungan” memasukan *Health Impact Assessment* (HIA) dalam proses penilaian pengaruh terhadap lingkungan adalah telah adanya dasar hukum untuk melakukan analisis. Selain itu, *Health Impact Assessment* (HIA) sebagai pendekatan penilaian pengaruh kesehatan telah lama dikenal.

Kekurangan pendekatan *Health Impact Assessment* (HIA) sebagai penilai pengaruh terhadap lingkungan adalah faktor penentu kesehatan dan kohesi sosial tidak secara eksplisit masuk dalam ukuran atau indikator penilaian pengaruh terhadap lingkungan.

b. Penilaian Pengaruh terhadap Lingkungan Sosial (Sosial Impact Assessment)

Penilaian pengaruh terhadap lingkungan sosial menganalisis efek sosial yang terjadi dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan pada masyarakat. Pendekatan

ini dikembangkan untuk melengkapi penilaian pengaruh terhadap lingkungan yang tidak menganalisis efek sosial kebijakan. Aspek yang dinilai dalam penilaian pengaruh terhadap lingkungan sosial adalah faktor-faktor dalam lingkungan kerja, budaya, norma, keyakinan dan nilai dalam masyarakat. Fokus penilaian ini adalah menganalisis kebijakan yang akan dilakukan dengan memperkirakan distribusi efek atau dampak yang akan berbeda-beda dalam masyarakat. Hanya menganalisis seluruh populasi tidak cukup untuk dilakukan karena kebijakan akan berdampak pada berbagai kelompok yang berbeda. Analisis pengaruh pada kelompok populasi yang berbeda sangat penting untuk dilakukan karena itu penialain dampak sosial memfokuskan pada

- Karakteristik populasi
- Isu politik dan sosial
- Perubahan individu dan keluarga
- Sumber daya komunitas dan institusional

Keuntungan dari penialain pengaruh terhadap lingkungan sosial adalah kesehatan dimasukkan pada isu sosial dan penilaian pengaruh terhadap lingkungan sosial, sehingga lebih luas daripada hanya menjelaskan faktor kesehatan. Kendati demikian, penilaian pengaruh terhadap lingkungan sosial tidak menyebutkan kesehatan secara eksplisit dan hal ini terkadang tersembunyi dalam konsep determinasi kohesi sosial.

c. Penilaian Pengaruh yang terintegrasi

Penilaian Pengaruh yang terintegrasi adalah pendekatan yang mempertimbangkan seluruh efek lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan ini menghindari pengabaian faktor-faktor kunci dan mempertahankan atau meningkatkan pembanguna berkelanjutan dan lingkungan. Penilaian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menginformasikan prediksi distribusi efek atau pengaruh untuk berbagai kelompok masyarakat di sebuah populasi.

1.3 Pelaku Kebijakan atau aktor dalam *Health Impact Assessment (HIA)*

Proses penetapan kebijakan biasanya melibatkan empat sumber aktor, yakni partai politik, kelompok penekan, aparat sipil negara, dan masyarakat. Partai politik dan aparat sipil negara adalah sumber utama dalam melaksanakan *Health Impact Assessment (HIA)*.

1.4 Waktu Pembuatan *Health Impact Assessment (HIA)*

Health Impact Assessment (HIA) dilakukan pada awal proses pengembangan kebijakan dan membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mendukungnya. Dampak kesehatan dari pilihan kebijakan-kebijakan dapat dipertimbangkan dengan menyeluruh pada pelaksanaan *Health Impact Assessment (HIA)*. Secara dinamis, akan terus terjadi perubahan sepanjang proses pengembangan kebijakan sehingga *Health Impact Assessment (HIA)* akan membutuhkan revisi sesuai dengan tahapan kebijakan. Artinya, *Health Impact Assessment (HIA)* akan berlangsung cukup panjang mengikuti proses pengembangan kebijakan agar berbagai temuan penting *Health Impact Assessment (HIA)* dapat terakomodasi dan menjadi input untuk revisi kebijakan. Umumnya, waktu yang dibutuhkan untuk secara formal melakukan *Health Impact Assessment (HIA)* berkisar enam bulan dan membutuhkan tambahan waktu enam bulan berikutnya untuk menuliskan. Di sisi lain, aktor politik membutuhkan rekomendasi yang dirumuskan dengan cepat. Dalam kondisi ini, dibutuhkan *Health Impact Assessment (HIA)* yang dilakukan sebagai pendekatan bersifat antisipatif dengan menggunakan metode penilaian cepat (*rapid appraisal methods*)

1.5 Metode *Health Impact Assessment (HIA)*

Metode penilaian pengaruh terhadap kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut,

1.5.1 Pendekatan dengan eksperimen sosial

Health Impact Assessment (HIA) dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi target kebijakan disebut sebagai kelompok terkontrol. Mereka adalah masyarakat yang menerima manfaat kebijakan. Di sisi lain terdapat masyarakat yang tidak menerima manfaat kebijakan. Pengaruh kebijakan dinilai sebagai perbedaan antara variabel sebelum dan sesudah diaplikasikan kebijakan. Hal ini yang dinilai adalah seluruh dampak dari faktor yang berpengaruh pada kebijakan.

Keterbatasan metode eksperimen sosial

- a. Metode ini lebih baik digunakan pada kebijakan yang belum dilaksanakan dibanding dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan
- b. Memiliki keterbatasan dalam cakupan, waktu dan geografis
- c. Masyarakat tidak dapat dilibatkan sepenuhnya dalam eksperimen sosial dengan pertimbangan aspek etika
- d. Membutuhkan biaya dan waktu yang cukup.

1.5.2 Pendekatan *difference-difference approach*

Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara dampak yang diterima oleh masyarakat yang menerima manfaat kebijakan dengan masyarakat yang tidak terlibat dalam kebijakan. Pendekatan ini sama dengan metode eksperimen sosial namun lebih fokus pada kebijakan yang sedang dilaksanakan. Masalah utama dalam pendekatan ini adalah menemukan kelompok yang sesuai untuk dibandingkan. Masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang dibandingkan tidak benar-benar sama dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan. Terkadang, kelompok yang dikontrol atau dipengaruhi kebijakan tidak benar-benar dapat dikomparasi dengan kelompok masyarakat lainnya. Karena pengembangan atau upaya apapun dari sebuah program/kebijakan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedua kelompok sehingga tidak mudah untuk benar-benar mengukur perbedaan dampak program/kebijakan antar kelompok.

1.5.3 Pendekatan Sebelum dan sesudah (before-after approach atau cross sectional)

Pada tingkat makro pendekatan ini disebut sebagai metode komparasi. Metode ini digunakan karena relatif memiliki ruang lebih dan keleluasaan untuk melaksanakan *Health Impact Assessment (HIA)* termasuk menetapkan fokus permasalahan yang dianalisis. Dalam tahap mikro metode ini membandingkan dampak pada masyarakat yang terlibat dalam kebijakan dengan masyarakat yang tidak terlibat dalam kebijakan. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa hal atau temuan dari hasil analisis *Health Impact Assessment (HIA)* yang dilaporkan sebagai dampak atau pengaruh dari program/kebijakan sesungguhnya merupakan hasil dari masalah temporer yang akan diperbaiki.

1.6 Tahapan melakukan *Health Impact Assessment (HIA)*

1.6.1 Screening

Screening adalah proses memilih kebijakan yang dinilai dengan mempertimbangkan dampak potensial pada faktor penentu kesehatan, dampak kesehatan, dan kelompok masyarakat. Akan mungkin terdapat dampak kebijakan berbeda pada kelompok masyarakat yang berbeda, oleh karena itu sering screening dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin pada faktor-faktor penentu kesehatan. Screening tidak hanya mengidentifikasi kebijakan yang akan dinilai tetapi juga mengidentifikasi kebijakan yang tidak dinilai. Kebijakan yang tidak dinilai adalah kebijakan yang memiliki dampak yang kecil pada kesehatan, kebijakan yang sudah mempunyai dampak yang sudah diketahui banyak orang dan terdokumentasikan serta kebijakan yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena ini screening menghasilkan tiga jenis keputusan, yakni

- a. *Health Impact Assessment (HIA)* dibutuhkan
- b. *Health Impact Assessment (HIA)* tidak dibutuhkan karena dampaknya telah diketahui atau kebijakan yang akan dinilai bersifat tidak dinegosiasikan

- c. *Health Impact Assessment (HIA)* tidak dibutuhkan karena memiliki dampak yang tidak signifikan

1.6.2 Scoping

Scoping adalah menentukan luasnya lingkup program/kebijakan yang akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya pada kesehatan. Scoping dilaksanakan dengan membuat kelompok pemantau pelaksana (steering). Tahapan Scoping juga akan menentukan pihak melaksanakan penilaian, lama waktu yang tersedia untuk melakukan penilaian dan metode.

1.6.3 Appraisal: Penilaian, Pelaporan dan Publikasi

Penilaian adalah kegiatan utama dalam proses *Health Impact Assessment (HIA)* setelah seluruh data dan bukti dikumpulkan dan siap untuk dianalisis. Penilaian dilakukan dengan rapid appraisal (penilaian cepat) atau comprehensive appraisal (penilaian komprehensif)

1.6.4. Rekomendasi Perubahan, Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Rekomendasi yang sudah dilakukan dari tahapan Panjang pelaksanaan *Health Impact Assessment (HIA)* mulai dari screening, scoping, appraisal berupa penilaian, pelaporan dan publikasi akan menjadi upaya yang tidak efektif apabila tidak disisipkan mekanisme pengawasan dan evaluasi sebagai tindak lanjutnya. Sangat penting untuk melengkapi rekomendasi dengan berbagai saran konkret tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi.

2. Review

2.1 Analisis kebijakan metode argumentatif

Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan:

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi.
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Analisis kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Meskipun produksi dan transformasi informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam analisis kebijakan, yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan dan penilaian secara kritis klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Klaim pengetahuan yang dikembangkan sebagai kesimpulan dari argumen-argumen kebijakan, mencerminkan alasan-alasan mengapa berbagai macam pelaku kebijakan tidak sepakat terhadap suatu alternatif kebijakan.

Argumen-argumen kebijakan, yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam elemen/unsur, yaitu :

1. Informasi yang relevan dengan kebijakan (I)

Dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analisis. Informasi tentang masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan titik tolak dari suatu argumen kebijakan.

2. Klaim Kebijakan (C)

Merupakan kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Jika klaim kebijakan mengikuti penyajian informasi klaim tersebut berbunyi “maka”. Dengan demikian, klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan.

3. Pembeneran/Warrant (W)

Merupakan suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.

Pembenaran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif, intuitif, analisentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Peranan dari pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidak-sepakatan atau konflik, dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.

4. Dukungan/Backing (B)

Dukungan (B) bagi pembenaran (W) terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak. Dukungan terhadap pembenaran dapat mengambil berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap pembenaran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan asumsi-asumsi yang menyertainya.

5. Bantahan/Rebuttal (R)

Merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan dan bantahan membentuk substansi isu-isu kebijakan, yaitu ketidak-sepakatan di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analis mengantisipasi tujuan-tujuan dan menyediakan perangkat sistematis untuk mengkritik salah satu klaim, asumsi dan argumennya.

6. Kesimpulan/Qualifier (Q)

Kesimpulan (Q) mengekspresikan derajat dimana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, pemberi sifat sering diekspresikan dalam bahasa probabilitas (seperti “Barangkali”, “Sangat mungkin”, “pada tingkat kepercayaan 0,01”). Ketika analis secara penuh yakin terhadap suatu klaim atau ketika kesimpulan sepenuhnya deterministik dan tidak mengandung kesalahan sama sekali, suatu kesimpulan tidak diperlukan

2.2. Struktur Pemahaman Masalah Dan Unsur Pemahaman Masalah

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya.

- Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut.
- Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda.

Dalam proses yang luas menurut Dunn (1999), beberapa fase yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pencarian Masalah (Problem Search)
2. Pendefinisian Masalah (Problem-Definition)
3. Spesifikasi Masalah (Problem-Spesification)
4. Pengenalan Masalah (Problem-Sensing)

2.3 Identifikasi berbagai masalah kebijakan

Selanjutnya Suharto (2010) terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan antara lain :

1. Mendefinisikan masalah kebijakan

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan,

antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan, dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

2. Mengumpulkan bukti masalah

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti tidak akan meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah kebijakan kita. Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Data bisa pula berasal data sekunder, yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen pemerintah. Naskah kebijakan yang berbentuk policy brief dan policy memo jarang menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer.

3. Mengkaji penyebab masalah

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada.

5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk

memecahkan masalah sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.

6. Menyeleksi alternatif terbaik

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah fisibilitas dan efektivitas. Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan. Dan juga pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap dampak dan tujuan keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan yang diusulkan

2.4 Model Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah di suatu institusi/lembaga, kampung, kantor dan bahkan penelitian perlu menggunakan suatu metode pemecahan masalah seperti :

- Analisa Pohon Masalah dan Harapan
- Analisa Tulang ikan
- Analisa SWOT
- dan lain-lainnya.

2.5 Model Analisis Implementasi Kebijakan

2.5.1 Model Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh

mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2.5.2 Model Edward III

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para

pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

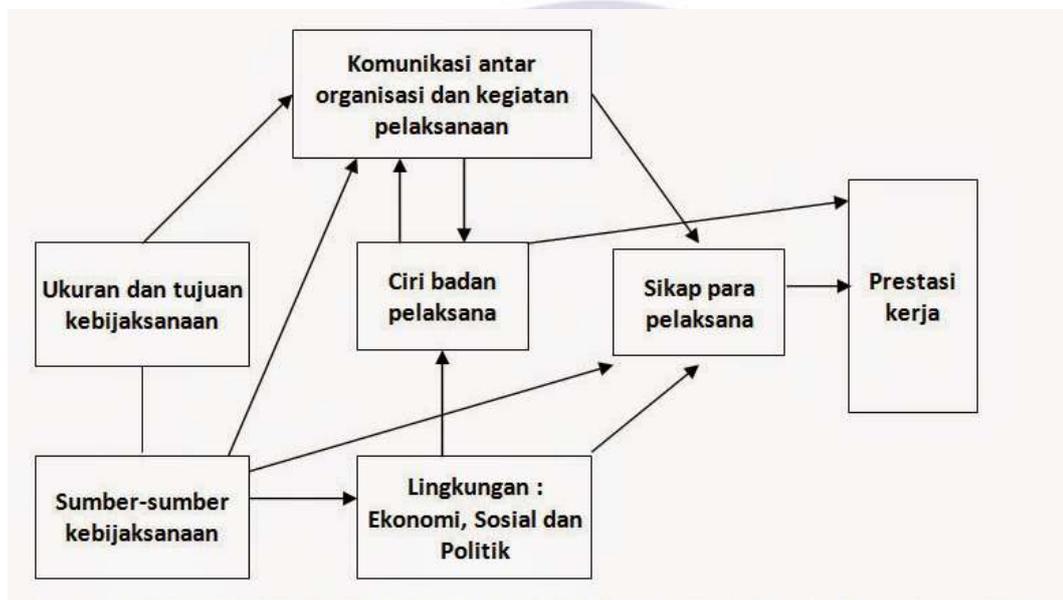
2.5.3. Model Mazmanian dan Sabatier

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang dituangkan dalam tulisan mereka yang berjudul: *A Frame Work for Implementations Analysis* (1983) bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keseluruhan proses implementasi selanjutnya diklasifikasi oleh Mazmanian dan Sabatier (1983: 21-30) dalam tiga variabel sebagai berikut: “1. *Tractability of the*

problems; 2) Ability of policy decision to structure implementation; and 3) Nonstatory variable affecting implementation”.

2.5.4 Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor. Seperti yang terlihat pada gambar



2.5.5 Model Hogwood and Gunn

Model yang dikembangkan Hogwood dan Gunn (2004) yang dikenal sebagai top down approach, antara lain: (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan /kendala yang serius; (2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; (4) kebijaksanaan yang akan diimplentasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil; (7) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (8) komunikasi dan

koordinasi yang sempurna, dan (9) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

2.6 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”. Dalam bahasa yang lebih singkat Jones mengartikan evaluasi adalah “Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”. Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak”. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi.

C. Latihan

1. Sebutkan Model Analisis Implementasi Kebijakan
2. Sebutkan Tahapan melakukan *Health Impact Assessment (HIA)*

D. Kunci Jawaban

1. Model Analisis Implementasi Kebijakan
 - a. Model Grindle

- b. Model Edward III
- c. Model Mazmanian dan Sabatier
- d. Teori Van Meter dan Van Horn
- e. Model Hogwood and Gunn

2. Tahapan melakukan *Health Impact Assessment (HIA)*

1 Screening

Screening adalah proses memilih kebijakan yang dinilai dengan mempertimbangkan dampak potensial pada faktor penentu kesehatan, dampak kesehatan, dan kelompok masyarakat.

2 Scoping

Scoping adalah menentukan luasnya lingkup program/kebijakan yang akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya pada kesehatan.

3 Appraisal: Penilaian, Pelaporan dan Publikasi

Penilaian adalah kegiatan utama dalam proses *Health Impact Assessment (HIA)* setelah seluruh data dan bukti dikumpulkan dan siap untuk dianalisis. Penilaian dilakukan dengan rapid appraisal (penilaian cepat) atau comprehensive appraisal (penilaian komprehensif)

4. Rekomendasi Perubahan, Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Rekomendasi yang sudah dilakukan dari tahapan Panjang pelaksanaan *Health Impact Assessment (HIA)* mulai dari screening, scoping, appraisal berupa penilaian, pelaporan dan publikasi akan menjadi upaya yang tidak efektif apabila tidak disisipkan mekanisme pengawasan dan evaluasi sebagai tindak lanjutnya. Sangat penting untuk melengkapi rekomendasi dengan berbagai saran konkret tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi.

E. Daftar Pustaka

- 1) Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- 2) Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2018. Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- 3) Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

